BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks. Pemerintah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur kehidupan warga negaranya. Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan mengemban tiga fungsi hakiki yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Jadi selain melaksanakan pembangunan, pemerintah juga memberikan pelayanan publik.

Institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat perlu menemukan dan memahami cara yang profesional dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, kebutuhan masyarakat menjadi tuntutan dan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pemerintahan perlu diselenggarakan secara dinamis, tanggap, cepat dan tepat sasaran.

Pelayanan terhadap masyarakat selama ini diupayakan oleh pemerintah selaku penyelenggara administrasi negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, telah mengubah paradigma sentralisasi pemerintah ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggung jawab kepada daerah. Hal ini berarti fungsi pelayanan pun telah didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Perubahan paradigma di atas menuntut pemerintah daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan unsur-unsur pemerintahan lokal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal. Dalam mengurus rumah tangga daerah dan pelayanan kepada masyarakat, kinerja pemerintah daerah melalui kapasitas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) perlu ditingkatkan.

Era globalisasi menuntut adanya kompetisi dari beberapa negara untuk saling bersaing guna merebutkan kedudukan sebagai negara penentu dalam dunia baik dalam bidang perekonomian, sosial budaya, politik dan sebagainya. Perkembangan sumber daya manusia juga dituntut agar lebih baik karena kemajuan teknologi, perdagangan dan sebagainya ditentukan oleh sumber daya manusia selaku pelaku dan penggerak semua itu.

Sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting di dalam pembangunan, disamping unsur lainnya seperti bahan, modal, dan teknologi. Pembangunan nasional dapat tercapai dengan baik, apabila ditunjang oleh sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting untuk tercapainya keberhasilan pembangunan.

Manajemen sumber daya manusia keberadaannya sangat dibutuhkan oleh organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta. Penilaian kinerja aparatur dalam organisasi merupakan hal yang sangat penting karena akan bermanfaat untuk mengetahui efektivitas kerja organisasi sehingga tujuan organisasi tersebut akan dapat tercapai. Penilaian kinerja pegawai bagi organisasi swasta atau perusahaan belum memiliki ukuran yang baku, namun organisasi pemerintah atau

instansi pemerintah sudah mempunyai aturan yang baku dalam penilaian kinerja aparatur.

Peran yang begitu besar sumber daya manusia sebagai pelaku utama dan juga merupakan *input* dari proses produksi dalam pembangunan akan tercapai apabila faktor-faktor penunjang optimalisasi peran tersebut tercapai. Salah satu faktor yang menentukan peran SDM adalah kinerja. Jika aparatur dalam organisasi atau perusahaan mempunyai kinerja yang baik, maka diharapkan akan mempunyai kontribusi positif terhadap organisasi atau perusahaan. Kinerja aparatur sangat ditentukan oleh seberapa baik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki aparatur dan memfasilitasi penyelesaian atau pencapaian kinerja mereka, diklat berkorelasi positif dengan kinerja pegawai.

Keseluruhan aspek penilaian tersebut diibaratkan bahwa semua aparatur memiliki tingkat kemampuan dan latar belakang yang sesuai dengan tuntutan kerja sebagaimana diatur dalam TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) dari instansi tersebut. Penilaian kinerja aparatur yang merupakan cara pembinaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi perlu dilakukan dengan prinsip-prinsip pembinaan personil yang tepat sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini tidak dianut didalam sistem penilaian kinerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah, disamping itu jarak antara pekerjaan dan penilaian kinerja selama satu tahun sangat kesulitan dalam penilaian, hal ini akan berakibat bahwa sipenilai tidak lagi obyektif dalam menilai anak buahnya bahkan yang ditemukan dilapangan penilaian kinerja aparatur justru diisi oleh pegawai yang dinilai

sedangkan atasannya yang mempunyai hak untuk menilai hanya melegalkan hasil dari penilaian tersebut.

Kinerja merupakan suatu proses untuk mencapai suatu hasil. Berbicara mengenai kinerja personil serta kaitannya dengan cara mengadakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang, maka perlu ditetapkan standar kinerja atau standar *performance.* Standar kinerja perlu diatur adalah seluruh kinerja organisasi, unit-unit organisasi yang mendukungnya, serta kinerja orang yang berperan didalamnya. Unsur utama yang harus dinilai kinerjanya adalah unsur manusia atau aparatur, karena pegawai yang berperan dalam menentukan kinerja organisasi.

Organisasi merupakan suatu kesatuan kompleks dengan kegiatan diantaranya mengalokasikan sumber daya manusia demi tercapai tujuan organisasi, salah satunya adalah peningkatan kinerja. Suatu organisasi pemerintah maupun swasta pencapaian tujuan ditetapkan melalui sarana dalam bentuk organisasi, yang digerakkan oleh sekelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku dalam mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan. Tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan karena upaya para pegawai yang terdapat pada organisasi sebagai kinerja pegawai.

Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No 5 Tahun 2001 merupakan organisasi pemerintah yang berfungsi merumuskan kebijakan teknis bidang pertamanan dan pemakaman, melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pertamanan dan pemakaman, serta melaksanakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, serta evaluasi, pelaporan dan pengawasan

keberadaan reklame. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, terdapat beberapa kendala atau tantangan di dalam instansi Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung. Salah satunya adalah dalam pengawasan keberadaan reklame insidentil yang perizinan atau permohonan pemasangannya langsung di Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.

Reklame merupakan suatu kekuatan yang menarik yang ditujukan kepada kelompok pembeli tertentu, hal dilaksanakan oleh produsen atau pedagang agar supaya dengan demikian dapat dipengaruhi penjualan barang-barang atau jasa-jasa dengan cara yang menguntungkan baginya. Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No 17 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Reklame bahwa reklame di bagi dalam dua jenis yaitu reklame permanen dan reklame insidentil. Reklame Permanen adalah reklame yang bersifat tetap dalam jangka waktu satu tahun atau lebih sedangkan reklame insidentil adalah reklame yang dipasang atau disebarkan hanya untuk jangka waktu kurang dari satu bulan.

Penataan reklame insidentil di Kota Bandung belum sesuai dengan PERDA NO 2 Tahun 2011. Semakin meningkatknya jumlah keberadaan rekalme insidentil liar yang ada di Kota Bandung mengakibatkan terpakainya zona hijau yang fungsinya untuk menata keindahan kota. Berbagai macam jenis reklame

insidentil liar yang dipasang oleh pemerintah, swasta maupun perorangan menjadi objek yang harus diperhatikan oleh Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung yang mempunyai fungsi dalam pengawasan keberadaan reklame agar menjadikan masyarakat Kota Bandung tertib akan pemasangan reklame.

Kinerja aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dalam mengawasi keberadaan reklame belum berjalan dengan baik. Masalah yang timbul dalam pengawasan secara teknis pun beragam, salah satunya adalah kurangnya sarana prasarana untuk melakukan pengawasan, seperti tidak adanya kendaraan yang mendukung untuk melakukan pengawasan langsung reklame insidentil di lapangan, tidak adanya waktu untuk mengadakan pengawasan kelapangan dikarenakan jam kerja yang habis di dalam kantor, tidak adanya pengecekan data reklame yang dilakukan oleh Aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, hingga belum terjalinnya komunikasi yang baik dalam pengawasan langsung ke lapangan antara SKPD pemerintah yang lainnya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

Sehingga dampak dari kurang baiknya kinerja aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dalam bidang pengawasan adalah banyaknya reklame insidentil liar yang tepasang di beberapa wilayah tiang panca yang tidak taat hukum atas pemasangan reklame, tidak tertibnya penataan reklame insidentil yang menyebabkan dekorasi dan tata kota menjadi tidak tertata dengan baik dan indah. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul "**Kinerja Aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Dalam Pengawasan Terhadap Keberadaan Reklame Insidentil di Kota Bandung".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk memperjelas fokus masalah yang akan ditulis dalam penelitian ini. Peneliti menyusun identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas aparatur dalam melaksanakan pengawasan keberadaan reklame insidentil di Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung ?
2. Bagaimana kuantitas aparatur dalam melaksanakan pengawasan keberadaan reklame insidentil di Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung ?
3. Bagaimana penggunaan waktu bekerja aparatur dalam melaksanakan pengawasan keberadaan reklame insidentil di Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung ?
4. Bagaimana kerja sama aparatur dalam melaksanakan pengawasan keberadaan reklame insidentil di Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Dinas Pemakaman dan Pertamanan dalam pengawasan keberadaan reklame di Kota Bandung. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kualitas aparatur dalam melaksanakan pengawasan keberadaan reklame insidentil di Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui kuantitas aparatur dalam melaksanakan pengawasan keberadaan reklame insidentil di Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui penggunaan waktu kerja aparatur dalam melaksanakan pengawasan keberadaan reklame insidentil di Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui kerja sama aparatur dalam melaksanakan pengawasan keberadaan reklame insidentil di Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Bagi kepentingan peneliti, hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengalaman, wawasan dan memahami kinerja aparatur dinas Pemakaman dan Pertamanan dalam pengawasan keberadaan reklame insidentil
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk mengembangkan teori-teori yang peneliti gunakan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan.
3. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk aparatur negara di Dinas Pemakaman dan Pertamanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dilihat dari pengawasan keberadan reklame insidentil di Kota Bandung.